

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah diskriminasi etnis di Indonesia bukan hal baru, melainkan sudah ada sejak lama dan punya akar sejarah, terutama karena pengaruh politik pecah belah di masa lalu (Murdianto, 2018). Meskipun masa itu sudah lewat, warisan buruknya, yaitu prasangka dan stereotip, masih terus hidup. Stereotip adalah anggapan yang disederhanakan dan biasanya negatif yang ditempelkan pada seluruh anggota kelompok etnis tertentu misalnya, anggapan bahwa etnis tertentu selalu pelit atau selalu kasar. Stereotip ini kemudian menjadi alasan bagi orang untuk berprasangka. Ketika prasangka ini diwujudkan dalam tindakan, itulah yang disebut diskriminasi. Dalam masyarakat yang majemuk seperti kita, masalah ini sangat berbahaya karena bisa merusak persatuan dan membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan tidak adil. Oleh karena itu, penting mengetahui bagaimana media, termasuk film, ikut campur tangan dalam masalah ini.

Film sebagai media komunikasi massa memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk dan memengaruhi opini publik karena kemampuannya yang unik dalam menyampaikan pesan, tidak hanya secara intelektual tetapi juga emosional melalui penceritaan visual yang kompleks. Kekuatan sinematik ini memungkinkan film untuk melewati filter rasional audiens, memungkinkan gagasan dan nilai-nilai tertentu diinternalisasi secara lebih dalam ke dalam kesadaran kolektif masyarakat (Aldo et al., 2023). Kekuatan ini terletak pada sifat bahasa visual yang non-linear dan holistik, yang mampu membangun mise-en-

scène yang kaya akan penanda budaya. Film, dengan demikian, melampaui sekadar sarana transmisi informasi. Ia adalah instrumen persuasi kultural yang mampu menciptakan ikatan emosional kuat antara narasi yang disajikan dengan pengalaman psikologis penonton. Proses ini memungkinkan penonton untuk melakukan identifikasi dan mengalami katarsis (pelepasan emosi), menjadikan pesan yang disampaikan, termasuk yang terkait isu sensitif, terasa lebih otentik dan diterima sebagai bagian dari realitas yang masuk akal. Film tidak hanya merepresentasikan realitas sosial, tetapi juga secara aktif mengonstruksi cara pandang penonton terhadap isu-isu kemanusiaan, budaya, maupun politik, sehingga dapat berperan sebagai sarana advokasi maupun kritik sosial yang efektif. Dengan daya jangkau yang luas, film mampu menyatukan audiens lintas batas budaya dan bahasa, menjadikannya instrumen strategis dalam mengedukasi, membangkitkan empati, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

Fungsi film tidak hanya terletak pada kapasitasnya membentuk opini publik melalui jangkauan luas, tetapi juga pada peran reflektif dan kritis yang ditawarkannya dalam membaca, menafsirkan, sekaligus menantang realitas sosial yang ada. Film tidak semata-mata berfungsi sebagai media hiburan, melainkan juga menjadi ruang refleksi yang memungkinkan penonton untuk memahami dan mengkritisi realitas sosial melalui representasi simbolik yang ditawarkan dalam narasi sinematik (Maharani et al., 2025). Dalam ranah ini, film seringkali beroperasi sebagai kritik sosial, menyingkap ketimpangan kelas, stratifikasi, serta ketidakadilan yang berlangsung di masyarakat, sehingga dapat memicu kesadaran kritis (*critical consciousness*) terhadap struktur sosial yang menindas. Namun,

penting untuk dicatat bahwa peran film adalah dwifungsi (dua fungsi). Di satu sisi, film bisa mengkritik; di sisi lain, film juga berpotensi mereproduksi dan memperkuat ideologi hegemonik (dominan). Film turut membangun konstruksi makna dengan menghadirkan wacana baru mengenai identitas, relasi kuasa, dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya instrumen penting dalam proses pembentukan perspektif sosial dan budaya. Oleh karena itu, representasi dalam film harus dicermati secara ketat. Pilihan visual, dialog, dan penggambaran karakter adalah tindakan pemaknaan yang dapat melanggengkan stereotip lama, khususnya ketika menyangkut isu sensitif seperti etnisitas, yang seringkali dikemas secara halus dalam bentuk narasi hiburan. Pengkajian mendalam terhadap mekanisme representasi simbolik ini menjadi sebuah keniscayaan akademik untuk mengungkap ideologi tersembunyi di balik layar sinematik.

Peran film sebagai medium refleksi dan kritik sosial semakin relevan secara krusial ketika dikaitkan dengan representasi isu diskriminasi etnis yang memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi dan mengkonstruksi pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial. Dalam kajian komunikasi kritis, menjadi imperatif untuk memahami secara mendalam bagaimana media, khususnya film, memilih dan menata representasi isu diskriminasi etnis. Hal ini dikarenakan media, jauh dari sekadar menyajikan hiburan, secara aktif berperan membentuk cara pandang (worldview) masyarakat terhadap perbedaan identitas sosial dan hierarki kekuasaan (Yulianto, 2016). Representasi diskriminasi dalam film berfungsi sebagai sarana naratif yang dapat membuka ruang diskusi kritis mengenai dampak sistematis dari ketidakadilan berbasis etnis. Ketidakadilan ini seringkali

bermanifestasi dalam bentuk marginalisasi ekonomi, penempelan stereotip negatif yang bersifat kultural, hingga eskalasi menuju kekerasan fisik terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, analisis kritis atas representasi diskriminasi etnis dalam film menjadi langkah awal yang penting dan strategis sebagai upaya membangun kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang lebih tinggi serta mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Teks film, oleh karena itu, harus dipandang sebagai medan ideologis tempat pemaknaan dan penerimaan diskriminasi dinegosiasikan.

Hal ini secara tegas menegaskan bahwa representasi diskriminasi etnis dalam film tidak hanya sekadar cerita fiksi, melainkan merefleksikan dan, dalam beberapa kasus, mereproduksi, realitas ketidakadilan sosial yang masih berlangsung. Diskriminasi etnis merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial paling laten dan persisten yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Realitas ini terjadi meskipun telah terdapat regulasi yang secara normatif mengatur prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi seluruh warga negara (Adrian et al., 2021). Praktik diskriminasi ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental, tetapi juga secara struktural dan kultural berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang mengancam kohesi sosial, stabilitas politik, serta sendi-sendi kebangsaan. Hal ini terbukti nyata sebagaimana tergambar dalam kasus-kasus rasisme dan ketegangan sosial yang menargetkan kelompok minoritas tertentu. Oleh karena itu, memahami mekanisme film dalam memvisualisasikan, mencegah, dan menindak praktik diskriminasi etnis menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil

dan setara, serta dalam konteks akademik, untuk mengungkap peran media dalam dinamika konflik sosial.

Sebagai negara yang sangat bangga dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, Indonesia menyimpan sebuah ironi pelik berupa diskriminasi etnis yang sayangnya mudah sekali tersulut, seolah keragaman yang dibanggakan hanyalah pajangan di kartu pos, tanpa kedalaman implementasi sosial. Meskipun Konstitusi telah menjamin perlindungan bagi kelompok minoritas, implementasi kebijakan dan penegakan hukum di lapangan sering kali menunjukkan adanya pincangnya keadilan (Musaddad et al., 2024). Contoh-contoh kasus yang terjadi berulang kali, seperti rasisme dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di luar daerahnya sebagaimana terekam dalam insiden di Surabaya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa isu rasisme ini masih menjadi "pekerjaan rumah" (PR) yang serius dan belum tuntas diselesaikan oleh negara (Ghozali et al., 2024). Pada saat yang sama, prasangka dan diskriminasi yang bersifat historis terhadap etnis Tionghoa juga masih mengakar kuat dalam memori kolektif dan pandangan sosial, menunjukkan adanya kesulitan berkelanjutan untuk benar-benar berdamai dengan sejarah dan menerima perbedaan secara utuh (M. Hidayat et al., 2023). Alhasil, diskriminasi etnis di Indonesia bukan hanya masalah moral dan kultural. Ia juga terkait erat dengan lemahnya penegakan hukum, di mana kasus-kasus kekerasan rasial seringkali seolah "menguap" tanpa adanya pertanggungjawaban yang tegas dari Negara. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa isu diskriminasi etnis adalah masalah multisekmen yang memerlukan intervensi kritik dari berbagai ranah, termasuk melalui analisis kritis media film.

Kondisi sosial yang ditandai dengan diskriminasi etnis menjadi semakin relevan untuk dikaji ketika dihubungkan dengan bagaimana film, sebagai medium representasional utama, memilih untuk menampilkan atau mereproduksi pengalaman diskriminasi etnis dalam kehidupan sosial (Audrey et al., 2018). Film memiliki kapasitas unik untuk menyerap dan memproses isu-isu sosial yang kompleks, mengubahnya menjadi narasi yang mudah diakses dan bersifat universal. Oleh karena itu, representasi dalam film tidak dapat dipandang sebatas cerminan pasif, melainkan sebagai upaya pemaknaan budaya terhadap isu diskriminasi yang nyata. Film seringkali berupaya memvisualisasikan ketegangan sosial yang tersembunyi, membawa pengalaman marginalisasi ke ruang publik, sehingga memaksa penonton untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Namun, pada saat yang sama, representasi yang bias atau dangkal dapat berbalik arah, justru menguatkan stereotip negatif dan menormalisasi pandangan diskriminatif yang ada, menjadikan analisis kritis terhadap teks sinematik menjadi sebuah keharusan metodologis.

Fenomena diskriminasi etnis sejatinya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari manifestasi verbal, non-verbal, hingga praktik struktural. Diskriminasi ini muncul melalui kemunculan stereotip yang mereduksi identitas individu menjadi sekadar karakteristik kelompok yang disederhanakan, prasangka yang mengarah pada penilaian negatif tanpa dasar, hingga perlakuan tidak adil dan sistematis terhadap kelompok tertentu (Ikasari, 2017). Dampak dari praktik ini sangat nyata, terlihat pada terjadinya keterpinggiran sosial (social marginalization) dan ketidaksetaraan sosial (social inequality) dalam aspek

pendidikan, ekonomi, dan politik. Realitas sosial yang penuh ketidakadilan ini kemudian banyak diangkat dalam film sebagai bentuk refleksi budaya dan dokumentasi naratif. Melalui narasi sinematik, film digunakan untuk menggambarkan secara emosional dan visual pengalaman diskriminasi yang dialami berbagai etnis, menyoroti luka sosial, dan mengungkap ketidakadilan yang masih berlangsung, menjadikan film sebagai catatan penting dari sejarah sosial yang berkejolak.

Dengan kemampuannya untuk memvisualisasikan dampak diskriminasi secara intim, film berfungsi sebagai medium penting untuk advokasi sosial dan pembangkit kesadaran kritis masyarakat mengenai bahaya dan implikasi diskriminasi etnis (Sisiana, 2025). Film mampu mengubah perspektif penonton dengan menghadirkan narasi dari sudut pandang korban, mendorong empati yang melampaui batas-batas identitas, dan merangsang diskusi publik tentang perlunya keadilan dan inklusivitas. Lebih dari itu, film juga dapat menjadi kritik keras terhadap kegagalan institusi dalam menegakkan prinsip kesetaraan. Dengan menampilkan adegan-adegan yang menunjukkan proses diskriminasi mulai dari makian verbal hingga kekerasan fisik film memaksa audiens untuk mengakui bahwa diskriminasi bukan hanya masalah moral individu, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi kolektif. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap representasi diskriminasi dalam film bertujuan untuk mengungkap kode ideologis yang bekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih setara dan menghargai keragaman.

Salah satu karya yang merepresentasikan fenomena ini secara mendalam adalah film "Pengepungan di Bukit Duri" karya sutradara dan penulis skenario kenamaan Joko Anwar (dirilis tahun 2025) merupakan salah satu film Indonesia yang sangat menarik dan mendesak untuk dijadikan objek penelitian akademik. Film ini tidak hanya menawarkan sinema aksi yang intens, tetapi juga menghadirkan isu sosial yang sangat relevan dan mendalam, khususnya mengenai diskriminasi etnis dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Berlatar tahun 2027, film ini dengan berani menampilkan gambaran Indonesia yang sedang dilanda krisis sosial parah, di mana ketidakadilan, kebencian berbasis etnis, dan kekerasan telah merajalela dan melumpuhkan tatanan sosial. Latar distopia ini berfungsi sebagai cermin kritis yang diperbesar (magnifikasi) terhadap masalah-masalah sosial riil yang mengakar di masa lalu. Relevansi tema ini semakin kuat mengingat Joko Anwar telah menulis naskah film ini sejak tahun 2007, namun baru direalisasikan dan diproduksi pada tahun 2024. Penundaan dan realisasi pada waktu yang spesifik ini menunjukkan intensi sang pembuat film agar pesan sosial yang diusung, terutama mengenai bahaya intoleransi dan diskriminasi etnis, terasa lebih aktual dan mendesak bagi penonton saat ini.

Dari segi dampak dan penerimaan publik, film ini berhasil mendapat perhatian besar, menunjukkan bahwa isu yang diangkat bukan hanya relevan tetapi juga resonansi yang kuat di tengah masyarakat. Film ini mencatat prestasi yang mengesankan, ditonton lebih dari 71 ribu penonton di hari pertama, mencapai 1 juta penonton dalam 10 hari, dan tembus 1,89 juta penonton hingga Juni 2025. Penerimaan luas dan capaian komersial yang signifikan ini membuktikan bahwa

film populer dapat menjadi medium efektif untuk diskusi kritis mengenai masalah-masalah sensitif, sekaligus menegaskan pentingnya meneliti bagaimana pesan sosial tersebut dikemas dan dikonsumsi.

Secara tematik, "Pengepungan di Bukit Duri" menjadi salah satu karya sinema Indonesia yang secara tegas dan eksplisit menyoroti konflik etnis dan ketegangan antar kelompok. Melalui narasi yang sering kali berangkat dari trauma kolektif dan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, film ini menampilkan diskriminasi, stereotip, dan ketegangan antar kelompok etnis bukan sekadar latar, melainkan sebagai realitas sosial yang merusak dan pernah dialami bangsa. Dengan menjadikan sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman, sebagai arena konflik dan pengepungan yang brutal, film ini secara simbolis mempertanyakan peran institusi dan otoritas dalam mengelola perbedaan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai representasi diskriminasi etnis melalui elemen audio-visual film ini sangat krusial untuk membongkar ideologi yang melingkupinya dan memahami bagaimana sinema populer berpartisipasi dalam wacana kritis sosial.

Berdasarkan argumen di atas, penelitian ini ingin menganalisis diskriminasi etnis yang terjadi dalam film "Pengepungan di Bukit Duri" dengan menggunakan analisis Semiotika. Pesan representasi diskriminasi etnis yang ditemukan dalam film tersebut adalah subjek peneliti. Dalam model semiotika, dunia digambarkan sebagai sistem hubungan yang terdiri dari unit dasar yang disebut "tanda". Oleh karena itu, semiotika menyelidiki kenyataan tentang keberadaan tanda. Menurut Bungin, Tanda-tanda yang dirujuk dalam penelitian ini adalah pesan-pesan yang terkandung

dalam adegan yang akan diteliti oleh peneliti, seperti makna dari pengambilan gambar, simbol-simbol yang digunakan, dan sebagainya. Semiotika konotatif, yang dipelopori oleh Roland Barthes, mengkaji sistem tanda tanpa berpegang teguh pada makna primer. Mereka berusaha memahami makna, tetapi memperolehnya melalui makna konotatif (Wirianto & Girsang, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana representasi diskriminasi etnis yang ditampilkan dalam film Pengepungan di Bukit Duri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana diskriminasi etnis direpresentasikan di dalam film Pengepungan di Bukit Duri dan mengungkap makna yang ada di balik tanda-tanda dalam film, baik secara denotasi, konotasi, maupun mitos, dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memperkaya kajian film dan komunikasi dengan perspektif semiotika Barthes, khususnya pada isu diskriminasi etnis.
2. Menjadi dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya tentang isu-isu representasi sosial dalam media audio-visual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana media (film) merepresentasikan diskriminasi etnis, serta meningkatkan kesadaran kritis terhadap isu keberagaman.
2. Membantu lembaga pendidikan atau komunitas film sebagai bahan diskusi dan kajian dalam memahami peran film sebagai cermin realitas sosial.